

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arie, B., & Widiastuti, K. (2020). *Standar dan Implementasi Desain Universal Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Distaru. (2021). *Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021*. Bekasi: Distaru Kota Bekasi.
- DPMPTSP. (2020). *Profil Investasi Kota Bekasi*. Bekasi: DPMPTSP Kota Bekasi.
- Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Mataram University Press.
- Fajri, N. (2021). *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*. Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Hariyanto, & Haris. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kholis, N. (2016). *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Penerbit Kyta.
- Kurniawan, H. (2017). *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mauna, B. (2011). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

JURNAL

- Adeng. (2014). Sejarah Sosial Kota Bekasi. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 397.
- Ayu, S. B., & Sakya, K. A. (2021). Studi Penerapan Desain Universal Terhadap Aksesibilitas Pasien Dengan Keterbatasan Fisik Di RSUD Dr Iskak. *Jurnal Arsitektur ARCADE* 5, halaman 1.
- Candra, G. (2017). Problematika Penarapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 186.
- Carroll, A. (2012). *World Report on Disability 2011*. United States: World Health Organization.
- Catherine, & Marshall. (2009). Disabilities. *Library of Congress Cataloging-in-Publication Data*, 19.
- Daming, S. (2016). Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori. *Jurnal HAM Vol. XIII*, 75.
- ESCAP. (2013). *Strategi Incheon Untuk 'Mewujudkan Hak' Penyandang Disabilitas Di Asia Dan Pasifik*. Bangkok: PBB.
- Farida, E. (2021). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal Qistie* 14, 43-52.
- Farida, E., Prabandari, A. P., & Rahayu. (2020). International Human Rights Instruments and Indonesian Legal Protection for Persons with Disabilities. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, 4483.
- Ginnerup, S., Council of Europe, Committee on the Rehabilitation and Integration , & Committee of Experts on Universal Design. (2009). Achieving Full Participation through Universal Design. *Publishing Editions Council of Europe*, 8.
- Harahap, R. M. (2019). Kajian Penerapan Desain Universal Pada Ruang Kuliah Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Desain & Seni FDSK-UMB*, 1-26.
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif VIII*, 17-29.
- Hasan, M., & Sari, E. (2005). Hak Sipil dan Politik. *Demokrasi* 4, 93-101.
- Hastuti. (2020). Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *The SMERU Research Institute*, 2.
- International Labour Organization (ILO). (2013). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *ILO*, 1.

- Jailani, M. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Jurnal FH Unisba*, 83-97.
- Jatmiko, B. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum* 3, 217-46.
- Jitek. (2016). Fungsi, Klasifikasi Dan Persyaratan Bangunan Gedung. *Jurnal Ilmiah Teknosains* 2, 4.
- Kemkes. (2012). Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Situasi Penyandang Disabilitas*, 19-24.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, 79-91.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas. *Inklusi* 3, 151-52.
- Magribi, L. M., & Suhardjo, A. (2004). Aksesibilitas dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transportasi* 4, 149-60.
- Merentek, Y. S. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum Vol. VI*, 180-87.
- Muhammad, S. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas . *Inklusi* 1, 269-90.
- Ndaumanu. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM* , 131-150.
- Nygaard, K. M. (2013). What Is Universal Design Theories, Terms and Trends. *Universal Design*, 1-30.
- Prabandari, A., Rahayu, & Farida, E. (2020). The Implementation of Indonesia's State Obligations in Relation to the Rights of Persons with Disabilities in Aviation. *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 29, ICETLAWBE* (p. 2). Bandar Lampung: EAI.
- Prawira, S. A., & Pranitasari, D. (2020). Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Disabilitas Di Kereta Rel Listrik Jakarta. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-15.
- Roebyantho, H. (2006). Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi. *Sosio Konsepia*, 48.

- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum* 4, 171-77.
- Sativa, & Bactiar, Y. B. (2020). Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra Dan Tunadaksa Di Gedung LPPMP UNY. *INERSIA: LN Formasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur* 16, 85-91.
- Sugiono, Ilhamnudin, & Rahmawan, A. (2014). Klaterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance. *Indonesian Journal of Disability Studies* 1, 20-26.
- Tauda, Y. A., Soedwiwahjono , & Putri, R. A. (2017). Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Tunanetra Dan Tunadaksa Di Kota Surakarta Terhadap Kriteria Kota Rumah Difabel. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 12, 181.
- Tesano. (2015). Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, 12.
- Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, 401-10.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum* 2, 113.
- Tully, S. (2002). ILO: Code of Practice on Managing Disability in the Workplace. *International Documents on Corporate Responsibility*, 4. Retrieved from International Labour Organization.
- Wahju, O. B. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung. *Jurnal HAM* 7, 35.
- Wijaya, F. (2020). Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana. *Justitia: Jurnal Hukum Dan Humaniora* 7, 798-810.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18, 2.
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. *Inklusi*, 21-22.
- Zuhdi, A. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 99.

PERATURAN INTERNATIONAL DAN NASIONAL

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

General Comment No.2 (2014) on Article 9: Accessibility

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Wawancara

Debby, *Wawancara Pribadi*, Tim Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, (Bekasi, 21 Juli 2022).

Dian Hendriany, *Wawancara Pribadi*, Penyandang Low Vision, (Bekasi, 17 Februari 2022).

Elli, *Wawancara Pribadi*, Tim Teknis Verifikasi Kelengkapan/ Kesesuaian Dokumen Rencana Teknis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Bekasi, 21 Juli 2022).

Hanggono, *Wawancara Pribadi*, Kepala Stasiun Bekasi, (Bekasi, 11 Agustus 2022).

Ning Budi, *Wawancara Pribadi*, Perwakilan HWDI – Penyandang Tuna Daksa, (Bekasi, 29 Desember 2021).

Hervita El Fatich, *Wawancara Pribadi*, Penyandang Tuna Rungu, (Bekasi, 17 Februari 2022).

Priyayanti, *Wawancara Pribadi*, Orang Tua dari Faizah Ibtisam Hajidah - Penyandang Disabilitas Tuna Rungu, (Bekasi, 29 Desember 2021).

Wiseno, *Wawancara Pribadi*, Wakil Kepala Stasiun Bekasi, (Bekasi, 11 Agustus 2022).

Website

[Pembangunan Revitalisasi Stasiun Bekasi Terus Berlanjut, Akses Keluar/Masuk Pengguna KRL Berubah Mulai Minggu – KRL](#)

<https://www.krl.co.id/hari-pertama-layanan-pengguna-kereta-melalui-bangunan-baru-stasiun-bekasi/>

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/412184/kota-bekasi-belum-maksimal-ramah-bagi-disabilitas>